

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. Deskripsi Teori

##### 1. Elit Preman

Istilah elit berasal dari baasa Inggris yaitu *elite* yang juga berasal dari bahasa latin *eligere*, yang mempunyai arti memilih.<sup>1</sup> Pembahasan tentang elit dalam kerangka teoritik merujuk pada makna sekelompok orang yang memiliki kekuasaan politik yang lebih dibandingkan orang lain.<sup>2</sup> Dalam pengertian yang umum elit merujuk pada sekelompok orang yang ada dalam masyarakat dan menepati kedudukan tertinggi. Sedangkan dalam pengertian secara khusus dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang terkemuka dibidang tertentu dan khususnya golongan minoritas yang memegang kekuasaan. Golongan minoritas tersebut berada pada posisi fungsional dan dapat berkuasa serta menentukan kebijakan. Elit adalah suatu minoritas pribadi yang diangkat untuk melayani suatu kolektivitas dengan cara bernilai sosial.

Premanisme merupakan fenomena sosial yang sering muncul dalam kehidupan masyarakat. Definisi premanisme sendiri tidak dapat ditemukan secara baku dalam perundang-undangan yang ada. Secara singkat premanisme dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang mengganggu dan merugikan kepentingan umum.<sup>3</sup> Kata preman berasal dari bahasa Belanda yaitu *vrijman*, yang mempunyai arti orang yang tidak terikat kerja. Sementara dalam bahasa Inggris istilah preman bersala dari kata *Free Man* yang bearti orang bebas. Penggunaan istilah

---

<sup>1</sup> Suzanne Keller, *Penguasa dan Kelompok Elit*, (Jakarta: Rajawali, 1995), 3. dikutip dalam Skripsi Diah Lestari, *Perilaku Politik dan Elite (Studi tentang Pengaruh Pilihan Poitik Elite PWNU pada Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017 Terhadap Khittah 1926)*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017), 28.

<sup>2</sup> Mohtar Mas'ood dan Colin Mac Andrews, *Perbandingan Sistem Politik*, ( Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000), 91. dikutip dalam Skripsi Diah Lestari, *Perilaku Politik dan Elite (Studi tentang Pengaruh Pilihan Poitik Elite PWNU pada Pilkada DKI Jakarta Taun 2017 Terhadap Khittah 1926)*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017), 28.

<sup>3</sup> Agung satriyo nukroho, R.B.Sularto, Buhi wicaksono, tinjauan kriminologis tindak premanisme oleh pengamen disimpang 5 kota semarang *diponnegoro naw Jurnal, vol 6 no 1 tahun 2017 hlm 6.*

preman pertama kali dikenal di medan, Sumatra Utara sejak zaman kolonial Belanda. Istilah tersebut kemudian melekat pada kaum lelaki yang menolak untuk bekerja di perkebunan milik Belanda dengan alasan mereka tidak mau diatur oleh penjajah. Tidak semua pelaku kejahatan dapat disebut sebagai preman. Penyebutan preman harus dilihat dari perilaku sosial seseorang atau kelompok.<sup>4</sup> Beberapa pendapat mengenai preman menurut tokoh psikolog barat, sebagai berikut:

- a. Preman menurut Nitibaskara berasal dari bahasa Inggris yang *free man* yang mempunyai arti orang merdeka, orang bebas, yang tidak memiliki ikatan terhadap institusi tertentu dalam mencari nafkah.
- b. Preman menurut Kunarto memiliki pengertian bahwasannya orang yang mau bebas, tidak tergantung pada lingkungan yang ada.
- c. Preman menurut Koentjoro mengandung makna bahwasannya segala tindakan melawan aturan, vandalisme, tindakan brutal, dan merupakan perilaku yang tidak cerdas yang kebanyakan dengan kekuatan (uang, pengaruh, massa, dan pendukung lainnya).

Untuk mendapatkan tujuan tertentu dengan mengabaikan perilaku seseorang yang membuat resah, tidak aman dan merugikan lingkungan masyarakat ataupun orang-orang lain dapat disebut sebagai preman. Dapat disimpulkan bahwasannya komunitas preman adalah keumpulan orang-orang yang berada dikawasan masyarakat yang menimbulkan keresahan dan kegaduhan. Seiring berjalannya zaman, mereka dengan sendirinya mulai berfikir untuk memenuhi penyembuhan suatu kondisi yang dipengaruhi persepsi perlunya penyuluhan dengan beranekaragam prosedur guna menolong sekaligus meluruskan mereka agar mampu menyesuaikan diri dengan tuntunan atau pedoman yang benar dan menjadi manusia yang selalu iman dan takwa kepada Tuhan.

Dalam mengonsolidasi kekuasaan kewilayahan ditingkat lokal, kelompok-kelompok ini pada taraf tertentu berhasil merebut legitimasi yang tidak semata-mata dilandaskan dengan cara yang tidak bagus serta cara mereka memanfaatkan posisi. Proses pergantian penguasa dikenal pula dalam model

---

<sup>4</sup> <https://t.me/kompascomupdate> dikutip pada hari Jum'at 08 Juli 2022 pukul 15:28 WIB.

elitis, dan proses ini dikenal sebagai sirkulasi atau perputaran elit. Proses sirkulasi elit dimungkinkan tidak hanya berlangsung di antara sesama mereka yang tergabung dalam kelompok elit, tetapi dimungkinkan pula melibatkan individu-individu yang berada di luar kelompok elit, yaitu kalangan massa ataupun dari kelompok menengah. Ada tiga kemungkinan yang menjadi faktor penyebab tersebut. Salah satu kemungkinan adalah mereka memang dengan sengaja menghindarkan diri dan tidak bersedia terlibat dalam kehidupan politik, walaupun mereka mempunyai wawasan politik yang relatif memadai. Kemungkinan lainnya, mereka tidak melakukan peran apa pun dalam kehidupan politik karena ketidaktahuannya.

Misalnya, individu-individu tersebut dapat digolongkan sebagai elit di bidang kehidupan ekonomi karena mereka adalah pengusaha yang berhasil. Namun, dalam waktu yang bersamaan mereka tidak termasuk dalam kelompok elit di bidang politik karena aktivitasnya di bidang ini dapat dinyatakan relatif jarang dan tidak menonjol. Berkaitan dengan hal tersebut, Schoorl menyatakan bahwa terdapat sejumlah permasalahan pokok yang harus dihadapi elit di negara yang sedang berkembang, yaitu:

- a. Pengembangan sistem politik baru yang cocok untuk melaksanakan modernisasi masyarakat pada umumnya dan pembangunan ekonomi.
- b. Harus terbentuk suatu kesatuan nasional dengan kebudayaan nasional.
- c. Perlu mengikutsertakan penduduk, atau setidaknya sebagian-bagian penting dari penduduk, dalam proses produksi modern.

## 2. Elit Politik

Dalam pengertian sosiologis dan politis, elit adalah *the ruling class*, suatu golongan yang memegang kekuasaan baik secara formal maupun informal dalam suatu strata sosial. Dengan kedudukannya itu, mereka dapat mempengaruhi perkembangan masyarakat dalam hubungan yang sifatnya timbal balik. Islam hadir sebagai agama yang membicarakan banyak hal, salah satu di antara pokok pembicaraan yang penting adalah politik. Meskipun Islam bicara politik, namun Islam sendiri tidak secara eksplisit menyebutkan bentuk sistem politik yang ideal. Dalam konteks ini, wacana tentang rumusan

politik yang ideal menjadi urgensi tersendiri di dalam tubuh umat Islam itu sendiri, terkhusus di hadapan peradaban Barat yang, bisa dibilang, telah menggempur umat Islam dengan kebudayaannya (karena dunia Islam itu sendiri sedang mengalami keterpurukan).

Di tengah kondisi itulah Fazlur Rahman hadir sebagai pemikir Islam yang mencoba menghadirkan konsep politik Islam yang “ideal”. Penelitian ini akan membahas tema tentang Konsep Politik Islam Menurut Fazlur Rahman. Penelitian ini didasarkan pada metode analitis-deskriptif yang didasarkan pada penelitian pustaka. Adapun hasil penelitian ini adalah: pertama, bahwa Islam tidak disebutkan secara eksplisit sistem politik Islam yang ideal. Kedua, Fazlur Rahman sendiri dalam lanskap tipologi politik masuk ke dalam tipologi moderat. Meskipun ia menolak formasi negara Islam, ia tetap menegaskan bahwa asas-asas Islam harus diterapkan dalam sistem negara. Ketiga, Fazlur Rahman menegaskan bahwa negara harus didasarkan pada pola syura, yang terdiri dari dewan legislatif dan eksekutif.

Bahwa asas-asas Islam substantif harus diterapkan dalam sistem negara. Fazlur Rahman menegaskan bahwa negara harus didasarkan pada pola syura, yang terdiri dari dewan legislatif dan eksekutif. ia masih menegaskan bahwa asas-asas Islam substantif harus diterapkan dalam sistem negara. Fazlur Rahman menegaskan bahwa negara harus didasarkan pada pola syura, yang terdiri dari dewan legislatif dan eksekutif. Islam menyebut politik dengan istilah *siyasah*. Politik *siyasah* mengatur segenao urusan umat, untuk itulah islam sangat menekankan pentingnya *siyasah*. Orientasi utama politik Islam terkait dengan masalah kekuasaan yaitu teganya hukum-hukum Allah dimuka bumi ini, hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan tertinggi ialah kekuasaan Allah swt. Al-qur'an QS. Al-Baqarah ayat 30 Allah swt. berfirman:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِىْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِىْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّىْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۳۰﴾

Artinya : “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khaifah di muka bumi. Mereka berkata: Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang kan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih kepada dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?, Tuhan berfirman: Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”. (QS. AL-Baqarah:30)

Elit politik dibagi menjadi dua baian, diantaranya elit politik lokal dan elit non politik lokal, elit politik loka merupakan seseorang yang menduduki jabatan pada bidang eksekutif dan legislatif yang dipilih melalui pemilihan umum dan dipilih dalam proses politik yang demokratis ditingkat lokal. Sedangkan elit non politik lokal adalah seseorang yang menduduki jabatan-jabatan startegis dan mempunyai pengaruh untuk meemrinta orang lain dalam lingkup masyarakat.<sup>5</sup> Teori elit menegaskan bahwa setiap masyarakat terbagi menjadi dua kategori, yani:

- a. Sekelompok kecil manusia yang berkemampuan dan karenanya menduduki posisi untuk memerintah.
- b. Sejumlah besar massa yang ditakdirkan untuk diperintah.

Munculnya *elit Politik* tidak lepas dari keadaan sosial politik masyarakat desa. *Elit Politik* menjalankan peran dan melakukan strategi pemenangan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dengan menggunakan ciri atau karakter lokal setempat. Aspek tersebut merupakan bagian dari indikator peran aktor politik dan strategi pemenangan dengan basis lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang memfokuskan penelitian pada peran dan strategi *elit Politik* dalam pemenangan Kepala Desa. Peran *elit Politik* dalam pemenangan Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara individu dan dalam tim pemenangan. Hubungan antara calon Kepala Desa dengan *elit Politik* berupa hubungan patron-klien, yaitu hubungan yang berlandaskan pada pertukaran sumber daya. Selain itu, *elit Politik* berperan sebagai perantara bagi calon

---

<sup>5</sup> HM Nasruddin Anshoriy Ch, *Bangsa Gagal Mencari Identitas Kebangsaan*, (Yogyakarta: LkiS, 20080, 4.

Kepala Desa dengan pemilih. Kedua, strategi yang dilakukan *elit Politik* dalam pemenangan ini menggunakan strategi pemenangan berbasis karakter lokal.

Strategi pemenangan berbasis karakter lokal merupakan langkah pemenangan yang dilakukan oleh calon Kepala Desa bersama *elit Politik* dengan memanfaatkan kebiasaan atau tradisi lokal. Strategi ini dinilai efektif untuk mengambil suara masyarakat dengan menggunakan pendekatan berbasis karakter lokal setempat. Namun demikian, kasus ini menarik sebab terdapat anggota *elit Politik* yang merupakan warga asli Desa Pancur.

Setiap masyarakat dierintah oleh sekelompok kecil orang yang memiliki kualitas-kuaitas yang diperlukan bagi kehadiran mereka pada kekuasaan sosial dan politik yang penuh. Mereka yang bisa menjangkau pusat kekuasaan adalah yang terbaik dan mereka dikenal sebagai elit. Posisi elit dalam wilayah yang politis memberikan pandangan kebijakan dalam sebuah tatanan organisasi maupun pemerintahan. Elit merupakan sekelompok orang kecil dalam sebuah masyarakat dan organisasi yang memegang posisi dan peran penting. Berkenaan dengan hal tersebut, maka keberadaan elit tidak dapat dilepaskan dari proses politik dan kekuasaan yang berlangsung dalam suatu masyarakat atau organisasi tempat dimana para elit tersebut tinggal.

Elit terbentuk dari kalangan yang diperintah dan seiring berjalannya waktu elit tersebut akan menggantian mereka, jika perludengan pergantian sebuah elit. Atas dasar uraian tersebut di atas dapat dinyatakan bahwa keberadaan dan peran elit politik lokal tidak bisa lepas dari pengaruh perubahan yang terjadi pada sistem politik yang melingkupinya. Perubahan yang terjadi pada sistem politik membawa pengaruh selain terhadap hubungan antara elit dengan massa, juga terhadap hubungan antara elit dengan negara. Untuk mempertahankan posisinya tidak bisa hanya dengan menyandarkan pada negara (pemerintah), tetapi harus mampu melakukan kalkulasi taktis untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan. Selain itu, dapat pula dinyatakan bahwa di kalangan internal elit berlangsung dinamika, di mana masing-masing individu elit saling bersaing untuk mempertahankan posisi dan peranannya. Oleh karena itu, dengan terjadinya perubahan sistem politik, elit politik lokal

harus mampu menyusun strategi untuk bisa meraih dan mempertahankan posisi dan perannya.

Peranan kaum elit di negara berkembang yakni sebagai pemegang sumber-sumber kekuasaan, seperti ekonomi, sosial budaya dan lainnya, sehingga otomatis dikenal masyarakat sebagai orang yang memiliki pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>6</sup> Garis besar perkembangan elit di Indonesia adalah dari yang bersifat tradisional yang berorientasi kosmologis dan berdasarkan keturunan kepada elit modern yang berorientasi pada negara kenakmuran, berdasarkan pendidikan. Elit modern ini lebih beraneka ragam daripada elit tradisional.<sup>7</sup>

### 3. Transformasi Elit Preman ke Elit Politik

Secara etimologis, politik berasal dari bahasa Yunani, *polis*. Kata *polis* banyak memiliki arti, seperti “*polities*” (warga negara) yang dalam bahasa Inggrisnya disebut *citizen* dan “*politicos*” yang berarti kewarganegaraan. Politik merupakan seni mengatur kolektivitas, yang terdiri atas beragam individu berbeda melalui serangkaian undang-undang yang disepakati bersama.<sup>8</sup> Politik lahir dari interaksi sosial dalam ruang yang kemudian melahirkan lembaga politik seperti negara dan berbagai institusinya.

Kekuasaan otoritatif akan bekerja secara efektif dalam suatu sistem yang disebut politik. Sistem politik ada dasarnya merupakan serangkaian struktur dan proses yang saling berkaitan yang menjalankan alokasi nilai-nilai kekuasaan secara sah.<sup>9</sup> Salah satu faktor yang mempengaruhi politik pemilu adalah loyalitas seseorang calon pemimpin terhadap latar belakang agama dan kelas sosial. Peribahasa Jawa mengatakan bahwa *Ajining diri ono ing lathi, ajining rogo ono*

---

<sup>6</sup> Henk Schulte dan Gerry Van Klinken, *Politik Lokal di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), 307.

<sup>7</sup> Robert Van Niel, *Munculnya Elite Modern Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1984), 180. dikutip dalam Skripsi Wawan Roesandy, *Eksistensi Elit Politik Terhadap Pilkada Kota Makassar Tahun 2018 (Telaah Ketatanegaraan Islam)*, (Makassar: UIN Alauddin, 2018), 4.

<sup>8</sup> Abd. Halim, *Politik Lokal Aktor, dan Problem, dan Konflik dalam Arus Demokrasi*, (Malang, Intrans Publishing, 2018), 1.

<sup>9</sup> Andi Muh Dzul Fadli, *Sistem Politik Indonesia*, (Yogyakarta: deepublish, 2017), 21-22

*ing busono*, yang memiliki arti harga diri seseorang dari lidahnya (omongannya), dan harga diri badan dari pakaiannya. Hal ini bermakna bahwa harga diri seseorang bisa dilihat dari gaya bicaranya. Setiap pemimpin harus sesuai dengan falsafah Jawa tersebut dengan menjaga lisannya, karena diantara ciri kepemimpinan yang diridloi Allah swt. adalah pemimpin yang jujur, amanah, dan bertanggung jawab. Allah swt. berfirman:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٦﴾

Artinya: “Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi tetapi mereka jikalau mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.” (QS. Al-A’raf [7]: 96)

Sebagai warga negara yang baik, dan ikut bertanggungjawab atas terciptanya kemamuran negeri, dapat dilakukan dengan ikut serta memilih pemimpin yang amanah dan bertanggung jawab. Abu Hasan Al-Mawardi dalam kitab *al-Ahkam as-Sulthaniyah* menetapkan tujuh syarat bagi seorang kepala negara, yaitu:

- a. Keadilan yang meliputi segala hal.
- b. Ilmu pengetahuan sampai pada tingkat saanggup berijtihad.
- c. Kesejahteraan indera pendengaran, penglihatan, dan lisan.
- d. Kesejahteraan anggota badan.
- e. Kesanggupan untuk memimpin rakyat.
- f. Kesanggupan untuk mempertahankan kehormstan dan berijtihad melawan musuh.<sup>10</sup>

Berkenaan dengan hal diatas, sebagai calon pemimpin yang mampu membawa kemajuan maka perlu adanya refleksi diri

<sup>10</sup> Moh Soehadha, *Wedi Isin (takut malu) Ajining diri (harga diri) orang Jawa dalam Perspektif wong cilik (rakyat jelata)*, *Studi Agama-Agama*, Vol. X, No. 1, tahun 2014, 2.

terhadap sikap dan karakteristik pemimpin yang telah dipaparkan. Dalam hal ini Kepala Desa Pancur bapak Muh. Arif Asharudin terdorong keinginannya untuk meruba diri menjadi lebih baik dengan menjadi seorang pemimpin. Motivasi terbesar bapak Muh. Arif Asharudin adalah dorongan dari keluarga serta keinginan yang luhur untuk meruba stigma masyarakat mengenai dirinya, tidak hanya itu bapak Muh. Arif Asharudin juga ingin melanjutkan perjuangan sang ayah yang dulunya merupakan Kepala Desa Pancur.<sup>11</sup> Dan juga ter motifasi dari teman-teman jalan mewujudkan dan meningkatkan serta meneruskan tata kelola pemerintahan desa yang baik, menigktatkan kehidupan yang harmonis, toleran saling menghormati dalam keidupan berbuaya dan agama di Desa Pancur, mengedepankan kejujuran, keadilan, transparansi dalam kehidupan sehari-hari dalam pemerintah maupun dengan masyarakat Desa Pancur.

Proses transformasi yang dialami oleh bapak Muh. Arif Asharudin merupakan salah satu upaya dalam membangun citra diri yang dimilikinya, selain itu sebagai langkah untuk memperbaiki diri, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, pengurus RT dengan mewujudkan badan milik desa (BUMDES) dan program lain untuk membuka lowongan kerja bagi masyarakat desa, serta meningkatkan produksi usaha rumah tangga kecil, Meningkatkan sarana dan prasarana dari segi fisik, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan budayaan desa, Mengupayakan tambahan insentif untuk guru PAUD, TPQ, MADIN dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa unruk perkembangan akhlak sejak usia dini.

Untuk itu dalam membangun integritas sangatlah penting dilakukan sebagai seorang pemimpin. Komunikasi dalam bersosialisasi yang dilakukan secara tidak langsung menimbulkan pendapat atau perilaku tertentu yang mempengaruhi cara orang lain mengorganisasikan perseopsinya dalam menilai diri seorang pemimpin tersebut. Membangun integritas sebagai seorang pemimpin bukanlah suatu hal yang mudah. integritas tidak dapat dibentuk dalam waktu yang singkat tanpa berkelanjutan. Komunikasi politik, membangun relasi dialogis dengan masyarakat secara terus

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan bapak Muh. Arif Asharudin selaku sumber data primer penelitian, Senin 15 Agustus 2022 pukul 08.15 WIB di Balai Desa Pancur.

menerus merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan.<sup>12</sup> Elit merupakan sekelompok kecil orang dalam masyarakat yang memegang posisi dan peran yang penting dan berpengaruh.

Dampak dari transformasi elit preman ke elit politik yang dialami bapak Muh. Arif Asharudin terhadap dirinya yakni integritas serta citra yang dimiliki menjadi lebih baik, berbanding dengan sikap sebelumnya. Integritas yang dimiliki menjadikan massa tertarik dan patuh terhadap kepemimpinan yang dijalankannya, sehingga roda kepemimpinan menjadi teratur dengan sikap tegas yang melekat pada diri seorang bapak Muh. Arif Asharudin. Salah satu kebijakan yang telah dicanangkannya yakni terkait tambang Desa Pancur yang asalmulanya tidak ilegal sekarang menjadi legal, pembayaran pajak di setiap tanggal 14 (wajib lunas), mengurangi kriminal dijalanan dengan membuka diaog terbuka antara Babinsa Desa Pancur dengan masyarakat sekitar sebagai upaya pelayanan masyarakat, pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos layanan terpadu, mengatur lewatnya kendaraan berat yang asal mulanya satu arah sekarang menjadi dua arah sehingga jalan penghubung antar warga tidak lagi terganggu.

Transformasi seseorang pemimpin yang berkaitan dengan watak, sifat, serta kepribadiannya dapat dilihat dari kisah salah satu khulafaur rasyidin yani Umar bin Khattab. Sebelum memeluk agama Islam, Umar bin Khattab menjadi salah satu musuh utama Nabi Muhammad yang paling keras dan menentang dakwah Nabi Muhammad saw. dimana Umar bin Khattab mendapat julukan *Hafs* (si singa pasir) perangnya yang keras dan kasar serta keberaniannya yang tidak atkut pada siapapun. Namun semua itu berubah setelah Umar bin Khattab memeluk agama Islam, ia menjadi orang yang terdepan untuk membela dan melindungi Nabi Muhammad saw. dan mendapatkan gelar *al-faruq*. Dari kisah tersebut, dapat diratik kesimpulan bahwa perubahan sifat, karakter, dan pribadi seseorang dapat saja terjadi. Kaitannya dengan hal tersebut, perilaku elit juga demikian. Transformasi kepribadian elit preman ke elit politik merupakan suatu trobosan baru yang berdampak positif bagi citra diri yang dimilikinya.

---

<sup>12</sup> Muh. Ma'sum Ja'far, *Pengaruh Citra Politik Tethadap Elektabilitas calon Bupati 2018 Di Kabupaten Luwu*, ( Makassar: Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, 2020), 31.

**B. Penelitian Terdahulu**

Tinjauan penelitian terdahulu diperlukan untuk mengetahui bahwa topik yang akan diteliti belum pernah diteliti oleh orang lain. Dari penelitian terdahulu inilah diperoleh relevansi topik, objek, serta teori yang akan digunakan dalam penelitian selanjutnya. Selain itu tinjauan pustka penelitian dapat digunakan untuk mengetahui keaslian suatu penelitian. Berikut peneliti paparkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini:

**Tabel 2.1**  
**Tinjauan Pustaka**

No	Nama Penulis, Tahun, Instansi	Judul	Hasil dan Kesimpulan Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Ian Douglas Wilson, 2015, CV. Marjin Kiri	Politik Jatah Preman (Ormas dan Kuasa Jalanan di Indonesia Pasca Orde Baru)	Menelisis tentang hubungan ntara kekuasaan negara, preman, dan penguasa kekerasan serta memberi gambarn umum yang lebih jelas mengenai kasus Jakarta dan menyajikan argumentasi utama buku tersebut. Buku ini menggunakan narasi sejarah, sosilogi politik, dan etnografi. Memusatkam perhatian kepada suatu aspek tertentu dari masyarakat yang kompleks dan dinamis.	Persamaan terletak pada pembahasan mengenai politik dan premanisme.	Pembahasa premanisme dalam buku Politik Jatah Preman tersebut ebih kepada dinamika lokal dan praktik-praktik kekuasaan negara dalam konteks Indonesia paca-otoritarian, sedangkan pada penelitia ini terfokus pada transformasi elit yang mana bermula dari elit preman ke elit politik.
2	Lailis Sunaikah, 2014, Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	Peran <i>Personal Branding</i> Elit Politik dalam Pembentukan Identitas Partai Politik (Studi Deskriptif Kualitatif <i>Personal Branding</i> Prabowo dalam Iklan TVC Partai Gerindra)	Dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa kekuatan <i>image</i> mencerminkan apa yang dipikirkan, egois, dan persepsi individu dalam suatu persepsi yang didasarkan atas yang	Sama-sama membahas tentang <i>Personal Branding</i> atau citra diri seorang pelaku elit politik. Persamaan juga terletak pada metode penelitian yang digunakan	Perbedaan terleta pada subyek dan obyek penelitian. Jika dalam penelitain yang dilakukan oleh Lailis Sunaikah tersebut terfokus pada

			<p>diketahui. Terbentuknya suatu image adalah hasil dari persepsi yang berkembang salam bena publik terhadap realitas yang muncul. Khalayak yang terbiasa memilih/mengikuti suatu partai politik tertentu maka mereka akan cenderung memilih konsistensi terhadap <i>brand image</i> atau disebut juga dengan <i>brand personality</i>.</p>	<p>dalam penelitian tersebut, dimana penelitian menggunakan jenis dan pendekatan penelitian kualitatif.</p>	<p>Studi Deskriptif Kualitatif <i>Personal Branding</i> Prabowo dalam Iklan TVC Partai Gerindra, sedangkan dalam penelitian yang peneliti lakukan terfokus pada transformasi elit oleh Kepala Desa Pancur.</p>
2	<p>Muh. Ma'sum Jafar, 2020, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Maksassar</p>	<p>Pengaruh Citra Politik Terhadap Elektabilitas Calon Bupati 2018 Di Kabupaten Luwu</p>	<p>Hasil penelitian mengungkapkan bahwa dalam pemilihan umum, reputasi, popularitas, elektabilitas mutlak dibutuhkan oleh seorang kandidat yang mencalonkan diri. Hal tersebut berkaitan dengan kemampuan seorang kandidat dalam mengelola citra positif yang ada dalam dirinya. Kemampuan mengelola citra sangat menentukan dalam menaikkan elektabilitas seorang calon pemimpin.</p>	<p>Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada kajian yang membahas tentang pentingnya citra positif yang harus dibangun dan dimiliki oleh seorang pemimpin.</p>	<p>Perbedaan terletak pada analisis permasalahan penelitian. Jika dalam penelitian tersebut memfokuskan pada elektabilitas calon bupati 2018 di kabupaten Luwu Makasar, berbeda dengan penelitian yang peneliti ini yang terfokus pada citra diri yang dibangun Kepala Desa Pnacur dalam proses transformasi ya dalam menjalankan peran sebagai elit politik. Perbedaan juga terleta</p>

					apda metode penelitian yang digunakan, dalam penelitian yang dilakukan oleh Muh. Ma'sum jafar tersebut menggunakan metode kuantitatif dengan instrument penelitian kusioner, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif.
3	Diah Lestari, 2017, Program Studi Ilmu Politik, Faultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	Perilaku Politik dan Elite (Studi tentang Pengaruh Pilihan Politik Elite PWNU pada Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017 Terhadap <i>Khittah</i> 1926)	Hasil penelitian dari skripsi tersebut menunjukkan bahwa perubahan situasi politik dapat mempengaruhi individu dalam menentukan keputusan politik. Untuk melihat perilaku organisasi harus dilihat dulu perilaku politik elite. Karena perilaku politik aktor/individu akan mencerminkan perilaku organisasi.	Persamaan penelitian yang dilakukan Diah Lestari dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai perilaku elit politik yang sangat berpengaruh terhadap cara kerja dalam sebuah organisasi yang dipimpinnya. Jika dalam penelitian yang dilakukan Dia Lestari tersebut organisasi yang dimaksud adalah PWNU maka dalam peneltian ini adalah sebuah lembaga pemerintahan desa.	penelitian karya Diah Lestari tersebut terdapat perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu pada fokus penelitian, subyek penelitian, dan juga metode penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Diah Lestari tersebut menggunakan metode penelitian studi pustaka dengan subyek penelitian perilau elit PWNU Jakarta,

					sedangkan pada penelitian ini menggunakan penelitian metode kualitatif dengan fokus penelitian terhadap citra diri seorang Kepala Desa dalam transformasi elit yang melingkupinya.
--	--	--	--	--	--

**C. Kerangka Berpikir**

Kerangka berfikir merupakan suatu gambaran yang menjelaskan secara garis besar alur isi dari sebuah penelitian yang dilakukan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mengkaji tentang transformasi elit preman ke elit politik serta pentingnya citra diri yang harus dimiliki oleh seorang Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya, dengan subjek penelitian seorang Kepala Desa Pancur Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara periode 2020-2025. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk mengungkap tentang seorang Kepala Desa Pancur dengan transformasi elit preman ke elit politik yang melingkupinya. Peneliti akan menjabarkan tentang transformasi elit preman ke elit politik yang dimiliki oleh Kepala Desa Pancur sehingga berhasil memperoleh kemenangan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tahun 2019, disamping transformasi elit yang dilaluinya. Secara lebih rinci berikut peneliti paparkan bagan tentang alur kerangka berpikir dalam penelitian ini.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berpikir**

